# Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)

Volume 2 -, Number 12 -, Desember 2022

p-ISSN 2774-5147; e-ISSN 2774-5155



## KURANGNYA PERHATIAN ORANG TUA TERHADAP PENDIDIKAN ANAK-ANAK INKLUSIF DI KAMANG BARU

# Kurangnya Perhatian Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak-Anak Inklusif Di Kamang Baru

## Tugiah, Ridwal Trisoni

Manajemen Pendidikan Islam, UIN Muhammad Yunus Batusangkar Email : tugiahtugiah4@gmail.com, ridwal.trisoni@iainbatusangkar.ac.id

## Abstrak

Dunia pendidikan sudah berkembang dengan pesat, sehingga memudahkan anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan menjamin masa depan lebih baik. Dalam perkembangannya dunia pendidiakan juga sudah menjamin kualitas pendidikan yang lebih maju dan berwawasan. Selain pendidikan untuk anak-anak multikultural negara juga sudah mendirikan sekolah dengan metode inklusi, sekolah ini didirikan untuk membangun lingkunagn yang terbuka untuk siapa saja dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda-beda. Sekolah dengan metode inklusi melupti karakter, kondisi fisik, kepribadian, status, suku, dan budaya yang tumbuh di masyarakat. Sekolah Inklusi merupakan sekolah regular (biasa) yang menerima anak berkebutuhan khusus dan menyediakan sistem layanan pendidikan. Melalui adaptasi kurikulum, pembelajaran, penilaian, dan sarana prasarananya.

Kata kunci: Inklusi, Multikultural, Pendidikan

## Abstract

The world of education has developed rapidly, making it easier for children to get a proper education and guarantee a better future. In its development, the world of education has also ensured the quality of education that is more advanced and insightful. In addition to education for multicultural children, the country has also established schools with inclusive methods, this school was established to build an environment that is open to anyone with different backgrounds and conditions. Schools with inclusive methods include character, physical condition, personality, status, ethnicity, and culture that grows in society. Inclusive schools are regular schools that accept children with special needs and provide an education service system. Through adaptation of the curriculum, learning, assessment, and infrastructure.

Keywords: Inclusion, Multicultural, Education

# **PENDAHULUAN**

Sebagai bangasa indonesia kita mengenal kalimat "tut wuru handayani" sebuah kalimat panjang yang diucapkan oleh Ki Hajar Dewan Toro sebagai bapak pendidikan (Mulyani, 2009). Kalimat tersebut sering kali menjadi rujukan bagi semua orang untuk mencerminkan konsep kepemimpinan yang baik. Jika dicermati setiap kalimat yang diucapkan menuntun bagi setiap pemimpin untuk bertindak agar setiap tindakan menjadi langkah yang baik dan bermanfaat bagi sekitar. Setiap ucapan dalam tut wuri handayani yang berbunyi secara keseluruhannya adalah "ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tut wuru handayani" lebih kurang yang memiliki makna "dari depan memberi teladan, dari tengah memberi bimbingan (motivasi, semangat, serta keadaan yang kondusif) dan dari belakang memberikan dorongan (dukungan moral).

Negara dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada Pasal 5 Ayat 1, bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu (Hakim, 2016). Berpedoman pada perundang-undangan tersebut setiap anak yang ada dinegara indonesia berhak dan memiliki kewajiban untuk mengenyam pendidikan, tidak terkecuali anak-anak istimewa yang berkebutuhan kusus. Karena sebagai negara yang berkemanusiaan adil dan beradab, mampu mengayomi seluruh kalangan masyarakat mampu atau tidak mampu harus merasakan indahnya pendidikan dan pengetahuan. Bagi anak-anak yang kurang mampu mengenyam pendidikan dengan mendapatkan beasiswa atau bantuan dari donatur.

Masalah yang ingin penulis angkat adalah kurangnya pemahaman orang tua yang memiliki anak-anak berkebutuhan kusus di Kamang Baru. Di kota besar sudah umum dengan sekolah inklusif tetapi di Kamang Baru sekolah ini tidak begitu populer dikalangan ibu-ibu yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus. Masalah ini terbukti dari kehidupan masyarakat yang masig berfikir bahwa anak yang kurang pandai cukup dirumah saja dan cukup ayah, ibu yang memberikan pendidikan. Padahal pemahaman orang tua tentang anak-anak ini tidak ada.

Banyaknya orang tua yang kurang mampu secara materi dan pengetahuan membuat anak-anak yang butuh perhatian khusus menjadi tertinggal dengan anak yang lain padahal merekapun mampu untuk mengikuti pendidikan dengan pendekatan inklusif.

Sejauh ini, pendidikan segregasi untuk anak berkebutuhan khusus tidak banyak menjanjikan dalam melayani mereka. Sebenarnya, ada banyak hal yang masih menjadi masalah bagi saya. Yang pertama menyangkut ekuitas. Sebagian besar pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus berlangsung di kota-kota besar, Kamang Baru Kec. Sijunjung berbeda dengan jauh dari jangkauan penduduk pedesaan. Hal ini menyebabkan lebih dari 40% jumlah penyandang disabilitas tidak memiliki akses pendidikan. Kedua, pendidikan segregasi mengandung nilai-nilai filosofis yang sedikit manfaatnya. Perbedaan antara anak normal dan normal yang membatasi mereka semakin terlihat. Hal ini membuat perbedaan semakin terlihat dan menimbulkan kecanggungan, seperti anak menjadi lebih tertutup terhadap masyarakat di sekitarnya. Hal ini menyebabkan di masa depan anak-anak akan semakin canggung dan takut bertemu dengan teman sebayanya ketika harus kembali dan beradaptasi dengan lingkungannya.

Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) merupakan perwakilan tertua dari pendidikan segregasi di Indonesia (Anshory, 2012). Faktanya, pemerintah dan organisasi non-pemerintah percaya ada kesetaraan dalam hal penyediaan layanan pendidikan khusus. Hal ini karena pemahaman bahwa layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus saat ini sangat dibutuhkan untuk membangun rasa percaya diri dan tanggung jawab sosial orang tua yang memiliki anak berkebutuhan kusu.

Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) sebagai representasi dari pendidikan segregasi tertua di Indonesia. Sebenarnya diselenggarakannya oleh pemerintah dan swadaya masyarakat agar terjadinya pemerataan dalam rangka memberikan layanan pendidikan khusus, karena pada saat ini terdapat pemahaman bahwa layanan pendidikan bagi anak yang berkebutuhan kusus sangat dibutuhkan untuk mengembangkan kepercayaan dirinya dan sesuai dengan pola pikir adalah sekolah segregasi.

Dalam Pasal 32 (UUSPN No. 20 Tahun 2003 Bab IV) menyebutkan bahwa pendidikan luar biasa atau pendidikan berkebutuhan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki

tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan kecerdasan dan bakat istimewa.

Berdasarkan Pasal 32 UUSPN, maka dalam layanan khusus anak tuna netra, tuna rungu, tuna grahita, tuna daksa, tuna laras, tuna ganda, serta anak berbakat yang masing-masing terpisah satu sama lain. Jumlah sekolah inklusi atau sekolah yang juga memberikan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus (ABK) di Kota Padang, Sumatera Barat, terus meningkat setiap tahunnya hingga saat ini tercatat 243. Kepala Tata Usaha UPTD Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif (LDPI) Dinas Pendidikan Kota Padang Gama Hartadini di Padang, Rabu mengatakan dari 243 sekolah inklusi itu, terdapat 44 sekolah di jenjang PAUD/TK, 161 sekolah di jenjang SD dan 38 sekolah di jenjang SMP. Seterusnya Hartadini menyebutkan jumlah sekolah inklusi terus meningkat setiap tahun, pada 2013 ada 67 sekolah, 2014 ada 75 sekolah, 2015 ada 109 sekolah, 2016 ada 133 sekolah, 2017 ada 154 sekolah, 2018 ada 191 sekolah, 2019 ada 216 sekolah dan data terakhir per September 2020 ada 243 sekolah.

Angka tersebut tersebar di tiga tingkat sekolah yakni 25 siswa di TK/PAUD terdiri dari 6 perempuan dan 19 laki-laki (Ervita, 2011). 1020 siswa SD terdiri dari perempuan 336 dan laki-laki 684 dan 230 orang siswa SMP terdiri dari perempuan 78 dan laki-laki 152 orang. Lebih lanjut ia mengatakan di sekolah inklusi juga ada guru pendamping khusus (GPK) yang ber¬tu¬gas mendampingi anak berkebutuhan khusus dalam proses belajar mengajar di kelas reguler. Lebih lanjut, Hartadini mengatakan, jumlah siswa ABK yang mengikuti pendidikan inklusi di sekolah reguler sebanyak 1.275 orang. Meskipun jumlah sekolah luar biasa meningkat secara kuantitatif setiap tahun, peningkatan ini belum sebanding dengan jumlah anak berkebutuhan khusus yang membutuhkan layanan pendidikan SLBN 1 KAMANG Baru Kuota guru: Laki-laki 12 siswa: 3 perempuan: 26. Padahal anak yang membutuhkan perhatian khusus lebih dari yang terdaftar di sekolah. Ini semua dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat tentang sekolah SLB sangat sedikit bahkan banyak diantaranya malu memiliki anak-anak ABK.

## METODE PENELITIAN

Pendidikan dari orang tua merupakan pondasi dasar bagi pendidikan anak, karena itu orang tua harus benar-benar berperan dalam proses tumbuh kembang anak. Dengan kata lain keberhasilan anak khususnya dalam bidang pendidikan, sangat bergantung pada pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya dalam lingkungan keluarga maupun ruang lingkup sekolah. Secara umum, disebutkan bahwa peran orang tua dalam keluarga adalah sebagai pengasuh dan pendidik, pembimbing spark, dan sebagai fasilitator. Betapa pentingnya peranan orang tua dalam pendidikan anak sehingga mengharuskan mereka untuk menjaga hubungan baik kepada pihak sekolah sebagai bentuk perhatian orang tua terhadap anak mereka.

Bahkan perhatian yang ekstra harus diberikan oleh orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus baik yang sekolah di sekolah khusus ataupun dalam konteks sekolah inklusi (Amin, 2015). Dalam konteks sekolah inklusi penting kiranya untuk orang tua dan pihak sekolah untuk membuat kemitraan yang baik satu sama lain. Beberapa sekolah inklusi di Barat memiliki contact instructors antara sekolah dan rumah, pendidikan inklusi telah mendorong keterlibatan orang tua, dengan menekankan pentingnya exchange dan konsultasi antara guru dan orang tua mengenai masalah pendidikan anak mereka. Demikian pula, isu pernyataan tentang anak berkebutuhn khusus juga mendorong lebih banyak kemitraan antara orang tua dan sekolah.

Penelitian ini adalah penelitian survei yang ber- tujuan menjelaskan suatu fenomena sosial. Pene- litian survei digunakan untuk menilai pikiran, opini, dan perasaan dari orang-orang yang menjadi subyek penelitian

# HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sekolah Inklusi

Sekolah inklusi merupakan salah satu bentuk pemerataan dan bentuk perwujudan pendidikan

tanpa diskriminasi antara anak-anak berkebutuhan khusus dan anak-anak pada umumnya dapat memperoleh pendidikan yang sama. Sekolah inklusi merupakan sekolah reguler (biasa) yang menerima anak berkebutuhan khusus dan menyediakan sistem layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak tanpa kebutuhan khusus (ATBK) yang sering disebut anak pada umunya dan anak berkebutuhan khusus melalui adaptasi kurikulum, pembelajaran, penilaian, dan sarana prasarananya.

Ada model sekolah inklusi yang dapat diterapkan di Indonesia sebagai berikut (<u>Darma & Rusyidi</u>, 2015).

- 1. Mainstream (Inklusi Penuh) Anak berkebutuhan khusus mengikuti kurikulum yang sama dengan anak mainstream dan belajar penuh waktu di kelas mainstream.
- 2. Kelas dan Gugus Sekolah Dasar Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak reguler di kelas umum dalam kelompok khusus.
- 3. Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak reguler di kelas utama, tetapi dipisahkan dari kelas utama pada waktu tertentu dan belajar dengan guru khusus yang ditarik ke dalam ruangan.
- 4. Kelompok Kelas Utama dan Terminasi Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak reguler dalam kelas kelompok khusus khusus dan dipindahkan dari kelas utama ke kelas lain pada titik-titik tertentu.
- 5. Kelas khusus dengan integrasi yang berbeda Anak berkebutuhan khusus belajar di kelas khusus di sekolah reguler, tetapi di daerah tertentu mereka dapat belajar di kelas reguler bersama anak-anak biasa.
- 6. Penyelesaian kelas khusus bagi anak berkebutuhan khusus yang belajar di kelas khusus di sekolah umum.
- B. Pendidikan Inklusi
- 1. Pengertian pendidikan inklusi

Dalam pendidikan, istilah inklusif dikaitkan dengan model pendidikan yang tidak mendiskriminasi individu berdasarkan kemampuan atau kecacatannya (Saputra, 2016). Pendidikan inklusif didasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan dan hak-hak individu. Istilah pendidikan inklusif digunakan untuk menggambarkan pengintegrasian anak berkebutuhan khusus (disability/disability) ke dalam program sekolah.

Konsep inklusi membantu kita memahami pentingnya mengikutsertakan anak-anak penyandang disabilitas dalam kurikulum sekolah, lingkungan dan interaksi sosial. Baihaqi dan M. Sugiarmin menjelaskan bahwa hakikat inklusi adalah tentang hak setiap siswa atas perkembangan pribadi, sosial dan intelektualnya. Siswa harus diberi kesempatan untuk menyadari potensi mereka. Untuk mewujudkan potensi ini, sistem pendidikan harus dirancang dengan memperhatikan perbedaan siswa.

Penyandang disabilitas khusus dan/atau kebutuhan belajar khusus harus memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas dan sesuai. Baihaqi dan Sugiarmin menekankan bahwa siswa memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi berdasarkan perkembangan pribadi, sosial dan intelektual mereka. Perbedaan yang ada antar individu harus disikapi oleh komunitas pendidikan dengan mengembangkan model pendidikan yang mengakomodir perbedaan individu tersebut. Perbedaan tidak serta merta menimbulkan diskriminasi dalam pendidikan, tetapi pendidikan harus tanggap dalam menghadapi perbedaan. (Alhaddad, 2020).

- 2. Landasan Pendidikan Inklusif
- a. Landasan filosofis

Landasan filosofis penyelenggaraan pendidikan inklusi di Indonesia adalah cita-cita yang berlandaskan pada lima rukun Pancasila dan landasan yang lebih mendasar yang disebut Bineka Tungaku Ika. Filosofi ini merupakan bentuk pengakuan terhadap keragaman manusia baik vertikal maupun horizontal. Ciri-ciri keragaman vertikal adalah perbedaan kecerdasan, kekuatan fisik, kekuatan ekonomi, kelas, pengendalian diri, dan sebagainya. Keanekaragaman horizontal ditandai dengan adanya perbedaan seperti suku, ras, dan bahasa. Disabled dan gifted hanyalah salah satu bentuk keragaman. Penyandang disabilitas memiliki kelebihan tertentu, seperti: B. Perbedaan suku, bahasa, agama, dll. Hal ini harus diwujudkan dalam sistem pendidikan. Sistem pendidikan harus memungkinkan asosiasi dan interaksi antara siswa yang berbeda untuk mendorong sikap satu per satu,

satu per satu dalam semangat toleransi.

#### b. Landasan Yuridis

Landasan yuridis memiliki hierarki dasar hukum, mulai dari konstitusi, anggaran dasar, peraturan pemerintah, perintah umum, peraturan daerah, perintah kepala sekolah hingga peraturan sekolah (Nasution, n.d.). Termasuk juga perjanjian internasional di bidang pendidikan. Pada tahun 1994, Konvensi UNESCO yang diselenggarakan di Salamanca, Spanyol, menetapkan bahwa pendidikan harus bersifat inklusif di seluruh dunia (Handayani & Rahadian, 2013). Fakta tersebut juga menyatakan bahwa pendidikan adalah hak untuk semua orang (education is for everyone), dan terlepas dari apakah seseorang memiliki hambatan atau kaya, pendidikan harus, juga menyatakan bahwa mereka tidak akan didiskriminasi atas dasar agama.

Pendidikan anak berkebutuhan khusus sedapat mungkin diintegrasikan ke dalam pendidikan regulernya, dan pemisahan dalam bentuk pemisahan tidak boleh untuk tujuan pendidikan, melainkan untuk tujuan pendidikan saja (Nurfadillah, 2021). Untuk tujuan pendidikan, anak berkebutuhan khusus umumnya perlu disosialisasikan di dunia nyata dengan anak lain. Dasar hukum pendidikan inklusif adalah:

#### • Instrumen Internasional

- a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948
- b. Konvensi PBB tentang Hak Anak Tahun 1989
- c. Deklarasi Dunia tentang Pendidikan Untuk Semua (Jomtien) Tahun 1990
- d. Peraturan Standar tentang Persamaan Kesempatan bagi para Penyandang Cacat Tahun 1990
- e. Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi tentang Pendidikan Kebutuhan Khusus Tahun 1994
- f. Tinjauan 5 tahun Salamanca Tahun 1999
- g. Kerangka Aksi Forum Pendidikan Dunia (Dakar) Tahun 2000
- h. Tujuan Pembangunan Millenium yang berfokus pada Penurunan Angka Kemiskinan dan Pembangunan Tahun 2000
- i. Flagship PUS tentang Pendidikan dan Kecacatan Tahun 2001

## • Instrumen Nasional

- a. UUD 1945 (amandemen) pasal 31
- b. UU Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3, 5, 32, 36 avat (3), 45 avat (1), 51, 52, 53
- c. UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat pasal 5
- d. Deklarasi Bandung (Nasional)" Indonesia Menuju Pendidikan Inklusif" 8-14 Agustus 2004
- e. Deklarasi Bukit Tinggi (Internasional) Tahun 2005
- f. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 380/C.C6/MN/2003 tanggal 20 Januari 2003 tentang pendidikan inklusif
- g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

## c. Landasan Religius

Sebagai bangsa yang religius, praktik pendidikan tidak dapat dipisahkan dari agama. Al-Qur'an menyatakan bahwa fitrah manusia itu berbeda (individual difference). Tuhan menciptakan manusia dengan cara yang berbeda-beda dengan maksud agar mereka dapat berhubungan satu sama lain dalam konteks saling membutuhkan. Abasa ayat 1-10 yang menggambarkan sikap Nabi terhadap Ibn Um Maktum yang buta, melalui ayat Asbabun Nuzur. Ibn Kathir menjelaskan bahwa Rasulullah telah berbicara dengan beberapa pemimpin Quraisy dan ingin mereka menerima Islam. Saat dia berbicara dan mengundang mereka, tiba-tiba Ibnu Unmi Maktum muncul dan dia adalah salah satu yang pertama menerima Islam. Maka Ibn Ummi Maktum seraya berpaling darinya dan menghadap orang lain. Padahal kedatangan Ummi Maktum pada saat itu meminta diajarkan kepada Rasulullah (Basri, 2022).

Surah 'Abasa ayat 1-11 merupakan peringatan dari Allah kepada Muhammad SAW, yang memandang tidak senang pada seorang buta yang memintanya untuk mengajarinya agama Islam.

Keberadaan peserta didik berkebutuhan pendidikan khusus pada hakekatnya merupakan manifestasi kemanusiaan sebagai perbedaan individu. Interaksi manusia harus terikat dengan pengejaran kebajikan. Ada dua jenis interaksi antara manusia: kooperatif dan kompetitif (Marzuki & Hakim, 2018). Hal yang sama berlaku untuk pendidikan, dan keduanya harus digunakan untuk mencapai tujuan belajar mengajar.

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an sebagaimana tertulis, menunjukkan adanya kesejajaran antara pandangan filosofis dan religius tentang hakikat manusia (Afendi, 2016). Keduanya adalah upaya untuk menemukan kebenaran hakiki. Filsafat hanya menggunakan akal, sedangkan agama menggunakan wahyu. Keduanya akan bertemu karena hanya ada satu sumber kebenaran yang hakiki dan itu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Landasan filosofis dan religi inilah yang kemudian menjadi landasan bagi pemanfaatan hasil penelitian sebagai produk tindakan ilmiah, dan juga memenuhi implementasi para pendidik.

## d. Landasan Pedagogik

Tujuan pendidikan umum adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik. Siswa menjadi warga negara yang setia, saleh, kreatif dan bertanggung jawab. Melalui pendidikan, anak berkebutuhan khusus diasuh untuk bertanggung jawab dan mencapai potensi penuh mereka. Konsekuensi dari hak warga negara atas Pendidikan.

Negara mewajibkan semua warga negara untuk mendapatkan pendidikan dasar sembilan tahun (9 tahun wajib belajar). Hak dan kewajiban warga negara harus dihormati tanpa tebang pilih.

Aris Armeth Daud Al Kahar — Pendidikan Inklusif sebagai Solusi Pendidikan untuk Semua. Tidak ada diskriminasi Sebagaimana dideklarasikan di Bangkok pada tahun 1991 atas nama persamaan hak, derajat, harkat, martabat sebagai warga negara Indonesia dan sebagai warga dunia penyandang disabilitas di mana saja. untuk menyediakan pendidikan bagi jutaan orang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan implementasi sekolah inklusi sangat relevan.

### C. Profil pembelajaran inklusi

Salah satu ciri terpenting sekolah inklusi adalah komunitas yang kohesif, menerima dan tanggap terhadap kebutuhan individu siswa. Sebagai gambaran, Sopon-Sevin mengatakan bahwa sekolah inklusi memiliki lima profil pembelajaran.

- 1. Pendidikan inklusif berarti merangkul keragaman, menghormati perbedaan, dan menciptakan dan memelihara komunitas kelas yang hangat. Guru memiliki tanggung jawab untuk menciptakan suasana kelas yang adil bagi semua anak dengan menekankan suasana sosial kelas dan dengan menjadi model perilaku yang menghargai perbedaan. Anak-anak tahu bahwa teman-temannya terpaksa menggunakan papan komunikasi karena mereka tidak dapat berbicara, anak-anak membaca dengan kecepatan yang berbeda, dan tidak semua orang di kelas merayakan Idul Fitri karena berbeda agama.
- 2. Pendidikan inklusif berarti penyelenggaraan kurikulum multijenjang dan multimoda. Mengajar di kelas yang heterogen membutuhkan perubahan kurikulum yang mendasar. Guru secara konsisten beralih dari pembelajaran berbasis buku teks yang kaku ke pembelajaran yang mencakup pembelajaran kolaboratif, pemikiran kritis tematik, pemecahan masalah, dan penilaian otentik. Contoh: Seorang guru kelas sedang merencanakan pembelajaran di Jakarta. Berdasarkan kartu DKI, kami mengembangkan materi pembelajaran seperti membaca dan menulis, pemecahan masalah kreatif, dan IPS. Kegiatan belajar mengajar dapat berbentuk permainan peran, penelitian kelompok kolaboratif, dll. Kegiatan yang direncanakan bersifat multimodal, interaktif, berpusat pada anak, partisipatif, dan menyenangkan.
- 3. Pendidikan inklusif berarti bahwa guru mempersiapkan dan mendorong pengajaran interaktif. Model tradisional seorang guru yang bekerja secara individu untuk memenuhi kebutuhan semua anak di kelas telah digantikan oleh model di mana siswa bekerja sama untuk mengajar satu sama lain dan secara aktif berpartisipasi dalam pengajaran dan pendidikan mereka sendiri harus diganti. rekan-rekan mereka bergabung. Antara pembelajaran kolaboratif dan kelas inklusif, semua anak berada dalam satu kelas dan belajar dari satu sama lain daripada bersaing.
- 4. Inklusi berarti terus mendorong guru dan kelas mereka dan menghilangkan hambatan yang terkait dengan isolasi profesional. Guru selalu dikelilingi oleh orang-orang, tetapi pekerjaan bisa menjadi profesi yang mengasingkan. Aspek kunci dari inklusi termasuk pendampingan

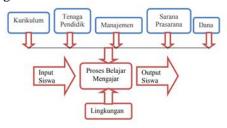
- oleh tim konsultatif yang suportif dan berbagai cara untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, dan dukungan dari mereka yang bertanggung jawab untuk membesarkan kelompok anak-anak. Kerjasama guru dan kelompok profesional lainnya dalam tim sangat penting.
- 5. Inklusi berarti melibatkan orang tua secara bermakna dalam proses perencanaan. Keberhasilan pendidikan inklusif sangat bergantung pada kontribusi orang tua terhadap pendidikan anaknya. Misalnya, partisipasi dalam penyusunan program pendidikan individu. Anak-anak yang berbeda yang diasuh di berbagai fasilitas profesional ditempatkan dalam tim untuk memenuhi kebutuhan masing-masing anak. Guru biasa perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar untuk menghadapi kelas yang heterogen, perlu mengembangkan kerja tim profesional yang berbeda, sekolah berkebutuhan khusus Semua anak harus diberi fasilitas yang memungkinkan mereka untuk belajar di sekolah.
- D. Model pendidikan inklusi

Melihat keadaan umum dan sistem pendidikan di Indonesia, model pendidikan inklusif dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, seperti:

- 1. Inklusi penuh (kelas reguler). Dengan kata lain, anak difabel belajar bersama dengan anak lain (kelas reguler) di kelas reguler dengan kurikulum yang sama sepanjang hari.
- 2. Kelas arus utama berkelompok, yaitu anak difabel belajar bersama anak reguler dalam kelompok khusus kelas arus utama.
- 3. Kelas arus utama dengan ekstraktor, yaitu anak penyandang disabilitas belajar bersama anak normal dalam kelompok khusus kelas arus utama, dan ditarik dari kelas arus utama ke ruang sumber pada waktu tertentu untuk Belajar dengan tutor khusus.
- 4. Kelas khusus dengan keterpaduan yang berbeda, yaitu anak difabel belajar pada kelas khusus di sekolah reguler, dimana mereka dapat mempelajari mata pelajaran tertentu bersama-sama dengan anak lainnya (biasa).
- 5. Menyelesaikan kelas khusus. Dengan kata lain, anak-anak penyandang disabilitas mengikuti kelas khusus di sekolah reguler.

Setiap sekolah inklusif dapat memilih model mana yang akan digunakan terutama berdasarkan kriteria: (1) Jumlah anak penyandang disabilitas yang diasuh. (2) sifat kelainan setiap anak; (3) gradasi (tingkat) kelainan anak. (4) ketersediaan dan kesiapan tenaga kependidikan; (5) sarana dan prasarana yang tersedia.

Berbagai faktor yang menentukan proses pembelajaran sebenarnya relevan ketika kualitas lulusan dipengaruhi oleh kualitas proses pembelajaran. Masukan siswa, kurikulum (bahan ajar), tenaga pengajar, infrastruktur, keuangan, administrasi dan lingkungan (sekolah, masyarakat, keluarga) juga perlu diperhatikan. Komponen ini merupakan subsistem dari suatu sistem pengajaran (learning system) dan mengubah salah satu subsistem memerlukan perubahan atau penyesuaian komponen lainnya. Ini dapat diilustrasikan dengan instalasi berikut:



## Gambar 1. Pembelajaran dikelas

Dalam hal ini, perubahan pembelajaran di kelas mengakibatkan perubahan input siswa terhadap kurikulum (materi), keterlibatan guru, sarana prasarana, sumber daya, administrasi (pengelolaan kelas), lingkungan, dan kegiatan belajar mengajar.

## E. Manfaat pendidikan inklusi

Penulis menyajikan manfaat pendidikan inklusi berdasarkan penelitian dari banyak ahli. Pendidikan inklusif memiliki banyak manfaat bagi semua siswa dan staf sekolah karena menjadi contoh atau model bagi masyarakat inklusif.

Manfaat pelaksanaan pendidikan inklusi adalah:

- 1. Baik di sekolah dasar maupun menengah, siswa di sekolah inklusi memiliki kinerja yang baik atau lebih baik daripada siswa di sekolah non-inklusif (Dakir, 2014).
- 2. Dalam pendidikan di sekolah dasar maupun menengah, siswa di sekolah inklusi memiliki kinerja yang baik atau lebih baik daripada siswa di sekolah non-inklusif (Zuniar & Chamdani, 2017).
- 3. Melalui penggunaan pembelajaran pendidikan kolaboratif, siswa penyandang disabilitas khusus dan asimilasi informasi, yang lambat mengalami peningkatan keterampilan sosial, dan semua siswa mengalami peningkatan kepercayaan diri terkait dengan kemampuan dan kecerdasan mereka.
- 4. Siswa penyandang disabilitas tertentu mengalami peningkatan harga diri dan kepercayaan diri hanya karena mereka belajar di sekolah umum daripada di sekolah luar biasa.
- 5. Siswa yang tidak memiliki kecacatan khusus mengalami program inklusif, menghasilkan peningkatan pemahaman sosial dan pemahaman yang lebih besar dan penerimaan siswa yang memiliki ketidakmampuan tertentu karena mereka mengalami kekurangan tertentu (Freeman & Alkin, 2000).

Terdapat 25 subyek yang memberikan jawaban beragam dari pertanyaan apa yang dipahami tentang pendidikan inklusi (pertanyaan 1), namun secara umum jawaban-jawaban mengenai pemahaman ten- tang inklusi tidak sesuai dengan definisi inklusi yang seharusnya. Adapun beberapa contoh jawaban subyek terhadap pertanyaan apa yang diketahui tentang in- klusi misalnya menyatakan bahwa inklusi adalah pen- didikan yang dilakukan dalam keluarga, sebagai pendi- dikan awal pada anak (SWS, orangtua); inklusi me- rupakan sekolah yang bisa menerima ABK dan non ABK (WS, guru); inklusi juga diartikan oleh beberapa subyek sebagai pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus yang tidak hanya orang tua/guru, tapi dengan didampingi dokter anak dan psikolog (OES, orangtua); inklusi sebagai pendidikan tanpa memandang perbedaan baik agama, budaya, ras maupun anak didik yang normal dan yang gangguana perkemabangan, bahkan terdapat pula subyek yang memahami inklusi sebagai pendidikan yang memaksa (LN, guru).

Respon subyek terhadap pertanyaan ke-2 secara garis besar dibedakan menjadi 2 kelompok kategori jawaban yaitu setuju atau tidak setuju jika siswa ABK berada di kelas regulardengan siswa non ABK. Adapun beberapa contoh jawaban beserta alasan subyek yang setuju jika siswa ABK belajar dalam kelas yang sama dengan siswa non ABK antara lain alasan bahwa setiap anak mempunyai bakat berbeda meskipun mempunyai gangguan sehingga apabila ABK dan non ABK belajar dalam satu kelas akan menambah kecerdasan siswa non ABK dan mengu- rangi rasa rendah diri pada siswa ABK. Alasan lain yang disampaikan atas jawaban setuju dari subyek adalah selama siswa ABK tidak mengganggu dan perilakunya masih dalam batas kewajaran, siswa ABK harus dengan guru pendamping, dan ABK dapat langsung belajar dan berinteraksi.

Sebanyak 22 subyek yang menyatakan tidak setuju menyertakan beberapa alasan antara lain: peri- laku ABK bisa mempengaruhisiswa lain yang non ABK, perhatian guru akan lebih tertuju pada siswa ABK, ABK membutuhkan framework, sekolah dan guru khusus. Kelebihan atau hal positif yang diperoleh apa- bila siswa ABK belajar bersama non ABK (pertanyaan 3) berdasarkan jawaban subyek antara lain: dapat melatih empati anak menerima kelebihan dan kekurangan teman, membuat ABK merasa tidak rendah diri, memberikan kesempatan yg sama dalam belajar bagi siswa ABK, siswa ABK dapat berinteraksi dengan teman yang lain dan tidak merasa dibedakan. Beberapa kekurangan/hal negatif yang diperoleh apabila siswa ABK dan Non ABK berada dalam satu kelas, antara lain: membuat pembelajaran tidak optimal dan kondusif karena siswa ABK akan mengganggu siswa lain, perilaku siswa ABK akan menular pada non ABK, guru akan lebih fokus pada siswa ABK.

Analisis deskriptif respon subyek (sikap orang tua)

	Pertanyaan	Jawaban	Frequency	Percent
1	Permohonan tentang pendidikan	Valid menjawab	5	16,67
	inklusi		25	83,33
		Total	30	100,0
2	Keberadaan ABK dikelas regular	Valid tidak setuju	22	73,3
	bersama siswa non ABK	setuju	8	26,7

		Total	30	100,0
3	Kelebihan/Kekurangan jika ABK	Valid tidak ada kelebihan	19	63,33
	bersama dengan non ABK dikelas		11	36,67
	reguler	Total	30	100,0
4	Tempat belajar yang tepat untuk	Valid sekolah khusus/SLB	26	86,67
	ABK	sekolah umum	2	6,67
		Tidak menjawab	2	6,67
		Total	30	100,0
5	Pihak yang berperan dalam proses	Valid ortu, guru,	21	70
	pembelaaran ABK	lingkungan, Dokter/psikolog	5	16,67
		Orang tua ibu	2	6,67
		Tidak menjawab	2	6,67
		Total	30	100,0

Pada pertanyaan ke 4 mengenai tempat belajar yang tepat bagi siswa ABK, respon/ jawaban subyek dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu jawaban yang menyatakan bahwa siswa ABK lebih tepat berseko- lah di sekolah khusus dan kelompok jawaban yang menyatakan bahwa siswa ABK dapat bersekolah di sekolah umu/regular. Namun demikian, masing-ma- sing kelompok jawaban disertai dengan alasan dan penjelasan oleh subyek penelitian.

Kelompok subyek yang memberikan jawaban bahwa siswa ABK seharusnya bersekolah di sekolah khusus memberikan alasan antara lain: harus dise- diakan sekolah/kelas khusus bagi ABK dengan didampingi guru khusus/dokter anak/psikolog, lebih tepat bersekolah di sekolah yang khusus menangani ABK dan adanya dukungan penuh dari pemerintah dimana guru hanya menangani 1-2 siswa saja, Subyek yang menyatakan ABK dapat berseko- lah di sekolah umum, menyertakan syarat sebagai alasan dari jawaban mereka, misalnya: bisa di sekolah umum jika di lingkungan sekitarnya tidak ada SLB, dan siswa ABK dapat bersekolah di sekolah umum jika mereka sudah melampaui sekolah khusus di usia dini.

Dan pada pertanyaan ke-5 sebanyak 70% su- byek menyatakan bahwa pihak yang berperan dalam pembelajaran ABK adalah orangtua, guru, dan ling- kungan. Namun demikian ada peran tenaga ahli/pro- fesional seperti dokter dan psikologi jauh lebih uta- ma sebagaimana respon sebanyak 16.67% subyek.

Berdasarkan hasil analisis information di atas, sikap orangtua dan guru terhadap implementasi inklusi di PAUD tergolong negatif. Gambaran sikap negatif dari orangtua dan guru dapat dilihat dari mayoritas jawaban-jawaban subyek terhadap 5 pertanyaan dari kuesioner yang diberikan. Respon jawaban subyek tentang pendidikan inklusi (83.3%), belum menggam- barkan adanya pengetahuan yang tepat dari orangtua serta guru tentang pendidikan inklusi. Pemahaman yang kurang tentang pendidikan inklusi ternyata me- lahirkansikap menolak (tidak setuju) sebanyak 73.3% subyek dengan menyatakan alasan bahwa kehadiran ABK dapat mengganggu proses pembelajaran. Selain karena pemahaman yang kurang, tidak adanya penga- laman dengan ABK pada seluruh orangtua khususnya sebagai bagian dari subyek penelitian membentuk persepsi negatif dan sikap menolak terhadap penerap- an pendidikan inklusi. Temuan ini mendukung peneli- tian Stoiber dkk (1998) bahwa orangtua yang memiliki ABK akan lebih bersikap positif dibandingkan de

Selain pemahaman yang kurang tentang inklusi, ketiadaan pengalaman dengan ABK, kurangnya pemahaman orangtua anak non ABK dan guru ter- kait dengan karakteristik ABK turut membentuk sikap penolakan dan kekhawatiran tersendiri bagi orangtua maupun guru. Kurangnya pemahaman ten- tang ABK tampak dari contoh jawaban 63.33% subyek yang menyatakan kekurangan jika ABK belajar di kelas normal bersama non-ABK misalnya meng- anggap perilaku ABK adalah destruktif yang dapat mempengaruhi atau ditiru oleh siswa non ABK, sertanggapan bahwa gangguan yang dialami ABK dapat menular pada non ABK. Kekuatiran dan sikap menolak dengan beberapa alasan kekurangan jika ABK belajar di kelas customary (inklusi) yang disam paikan oleh subyek dalam penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Guralnick dkk (1996), Favazza dan Odom (1996) dan Hanline (1993) yang mene- mukan bahwa anak-anak non ABK dan ABK dapat berinteraksi bersama ketika mereka terlibat dalam kelompok bermain. Anak-anak non ABK di taman kanak-kanak akan memiliki pemahaman yang baik tentang konsep kecacatan dan lebih menerimaan terhadap teman-teman ABK ketika ber- interaksi bersama. Berdasarkan survey penelitian yang

dilakukan Ruijs dan Peetsma (2009) tampak lebih banyaknya efek positif dari pendidikan inklusi terutama dalam kondisi sosial anak, misalnya: anak- anak di sekolah inklusi mendapatkan partiality yang lebih sedikit dan lebih memiliki sikap yang positif terhadap orang lain.

Temuan penelitian berikutnya adalah mayori- tas orangtua dan guru (sebanyak 86.67%) lebih mendukung apabila ABK berada di sekolah khusus di- bandingkan belajar bersama-sama dengan anak non ABK. Temuan ini mendukung penelitian yang dila- kukan oleh Hosseinkhanzadeh dkk (2013) tentang sikap orangtua dan guru terhadap pendidikan anak berkebutuhan khusus (misal: anak berbakat) adalah menyetujui pemisahan antara anak berbakat dengan anak typical lainnya karena dinilai dengan mema- sukkan anak berbakat di pusat pendidikan khusus akan memperoleh penanganan yang lebih tepat. Pendidikan yang memisahkan antara ABK dan Non ABK dinilai lebih efektif oleh guru yang termasuk dalam 86.67% subyek tersebut diatas karena tidak memberatkan guru terlebih guru di sekolah umum yang tidak memiliki kemampuan pedagogi dan tata laksana pendidikan inklusi.

Temuan tersebut juga mendukung penelitian yang dilakukan O'Donoghuedan Chalmers (2000) bahwa guru yang mengajar di kelas inklusi membutuhkan pengetahuan, ability, dan kemampuan yang memadai untuk menangani ABK. Kendala yang disampaikan guru tersebut bisa men- jadi faktor yang menghambat penerapan inklusi di Indonesia sehingga perlu diteliti sebagai dasar pem- buatan kebijakan (arrangement) dalam penerapan layanan pendidikan yang efektif bagi siswa ABK sebagaimana yang disampaikan oleh 70% dari subyek pene- litian. Menurut Anabel Morina (2016) keberhasilan ABK, (incapacities) dalam belajar membutuhkan ke- bijakan, strategi, proses, dan aksi pendidikan inklusif yang membantu semua peserta didik berhasil dalam belajar.

Menurut Sri Joeda Andajani (2014), pendidikan inklusi itu dapat dilaksanakan dengan baik melalui (a) perencanaan yang sesuai dengan kemam- puan peserta didik, (b) sumber dan media pembelajaran yang mampu menstimulasi semua peserta didik tanpa kecuali, (c) pengelolaan pembelajaran kelom- pok yang mampu bekerjasama dalam belajar, dan (d) pemberian penilaian langsung terhadap hasil belajar ABK. Atas dasar itu, para guru dan orangtua perlu meningkatkan pamahaman dan keterampilannya dalam memberikan pendidikan inklusi. Kesulitan yang dihadapi ABK dalam pembelajaran inklusi di sekolah adalah kesulitan mengikuti pembelajaran. Hal ini sesuai dengan penelitian Endro Wahyuno, dkk (2014) yang menyatakan bahwa kesulitan ABK mengikuti pembelajaran dalam kelas inklusi karena sulit berkonsentrasi. Kondisi ini dapat dipahami karena ABK memiliki karakteristik khusus yang belajar di lingkungan yang umum sehingga kesulitan berkomunikasi dan sulit berkonsentrasi.

## **KESIMPULAN**

Manusia di muka bumi memiliki dua fungsi utama: Abdu (Hamba) dan Khalifah (Pemimpin). Pelaksanaan tugas khilafah harus dibarengi dengan pengembangan potensi manusia oleh seluruh elemen, termasuk lembaga pendidikan. Sebuah lembaga pendidikan modern harus melayani semua siswa dengan kebutuhan yang berbeda. Baik anak pada umumnya maupun anak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusif harus mempertimbangkan kebutuhan berbagai segmen anak. Model inklusi adalah model sekolah yang memungkinkan semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus dari berbagai latar belakang dan disabilitas, untuk belajar bersama anak reguler dalam kurikulum yang memenuhi kebutuhan anak. Proses pembelajaran dilakukan sesuai dengan kebutuhan siswa . Integrasi atau model keterpaduan siswa berkebutuhan khusus dan reguler biasanya memberikan kesempatan yang sama untuk belajar bersama di sekolah yang sama, dan siswa berkebutuhan khusus biasanya dapat bergabung dengan anak reguler. Pendidikan inklusi menitikberatkan pada prioritas anak berkebutuhan khusus di sekolah umum, dan anak beradaptasi dengan kurikulum dan pembelajaran yang dilakukan di sekolah inklusi. Peran pendidik sangat penting dalam menjalankan tugasnya, terutama guru pendamping. Pendidikan inklusif merupakan wadah bagi siswa yang beragam untuk mencapai pendidikan untuk semua.

Pendidikan yang memisahkan antara ABK dan Non ABK dinilai lebih efektif oleh guru yang termasuk dalam 86.67% subyek tersebut diatas karena tidak memberatkan guru terlebih guru di sekolah umum yang tidak memiliki kemampuan pedagogi dan tata laksana pendidikan inklusi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afendi, A. H. (2016). Al-Islam Studi Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tarbawi). Deepublish.
- Alhaddad, M. R. (2020). Konsep pendidikan multikultural dan pendidikan inklusif. *Jurnal Raudhah*, 5(1), 21–30.
- Amin, B. (2015). Peran Orang Tua dalam Pendidikan Inklusif (Peran Orang Tua Anak Berkebutuhan Khusus dalam Konteks Sekolah Inklusi). *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogjakarta*.
- Anshory, I. (2012). Persepsi Mahasiswa PGSD Terhadap Program Unggulan Untuk Menjadi Lulusan Yang Mampu Mengelola Pembelajaran di Sekolah Inklusi. *Jurnal Humanity*, 8(1).
- <u>Basri, B. (2022).</u> THE ISLAMIC EDUCATION WITHOUT DISCRIMINATION IN THE QUR'AN PERSPECTIVE. *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Algur'an Dan Tafsir*, 7(1), 121–135.
- <u>Dakir, D. (2014).</u> Manajemen layanan pendidikan siswa berkebutuhan khsusus prespektif religious, filosofis, yuridis dan historis. K-Media.
- <u>Darma, I. P., & Rusyidi, B. (2015).</u> Pelaksanaan sekolah inklusi di Indonesia. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2).
- Ervita, A. (2011). Studi tingkat efektivitas pelayanan fasilitas pendidikan sebagai salah satu indikator mewujudkan kota layak anak (Studi Kasus di Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta).
- <u>Freeman, S. F. N., & Alkin, M. C. (2000).</u> Academic and social attainments of children with mental retardation in general education and special education settings. *Remedial and Special Education*, 21(1), 3–26.
- Hakim, L. (2016). Pemerataan akses pendidikan bagi rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1).
- <u>Handayani, T., & Rahadian, A. S. (2013).</u> Peraturan perundangan dan implementasi pendidikan inklusif Mulyani. *Masyarakat Indonesia*, *39*(1), 149701.
- Marzuki, I., & Hakim, L. (2018). MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF PERSPEKTIF AL-QUR'AN. Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan, 14(02).
- Mulyani, S. (2009). Upaya meningkatkan kemampuan membaca menulis permulaan siswa kelas I melalui penerapan pendekatan pembelajaran terpadu (PTK di SDN 04 Punduhsari). UNS (Sebelas Maret University).
- Nasution, H. A. R. (n.d.). KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT ATAS PENGHENTIAN KEGIATAN ORMAS FPI MELALUI SKB 3 MENTERI NOMOR 220-4780 TAHUN 2020. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif HIdayatullah Jakarta.
- Nurfadillah, S. (2021). Pendidikan Inklusi Tingkat SD. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Saputra, A. (2016). Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Inklusif. *Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*, 1(3), 3.
- Zuniar, F., & Chamdani, M. (2017). Pengelolaan Kelas yang Baik dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di Kelas Inklusi. *Prosiding Seminar Nasional Inovasi Pendidikan*.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License